Kata Pengantar
Direktur Eksekutif PATTIRO Surakarta

Inovasi Untuk Warga Proaktif dan Pemerintah Progresif

Tujuan dibentuknya Negara adalah mewujudkan kesejahteraan. Pelayanan Publik merupakan wujud pelaksana tugas negara. Semakin kompleknya permasalahan maka pelayanan publik pun perlu dikelola lebih baik. Untuk menjamin dilaksanakannya pelayanan secara berkelanjutan dibutuhkan inovasi dalam pelayanan public, manajemen pelayanannya, *delivery* pelayanan maupun kebijakan.

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta sejak didirikan pada 4 April 2001, senantiasa mengembangkan inovasi dalam metode, maupun isu advokasi. Jika pada awal kiprah PATTIRO menempatkan sebagai kekuasaan yang senantiasa harus diawasi dengan paradigma berhadapan, pengalaman advokasi yang dilakukan selama ini telah mengantarkan pada strategi untuk bermitra dalam mengelola pemerintahan dan kebijakan agar berpihak kepada masyarakat miskin dan kurang beruntung.

Perubahan strategi tersebut diikuti pula dengan perubahan dalam metode. Pada tahun 2009 ini, kami mencatat sejumlah inovasi metode yang terus menerus disempurnakan. Metode *Women Report Card* (WRC) di Kabupaten Boyolali yang kemudian diintegrasikan dengan Program Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG). Metode ini bukan saja telah membangun kesadaran politik warga khusunya perempuan, namun juga kesadaran dari pamerintah pada tingka kabupaten sampai tingkatan desa.

Program *Civil Society Initiatives for Agants Poverty* (CSIAP) yang diimplemetasikan di Propinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta dan Kabupaten Situbondo, menarik untuk ditindaklanjuti. Kegelisahan atas persoalan *sustainibilty* misi yang biasanya terhenti ketika tidak ada lagi project pada organisasi semacam LSM, dicoba untuk diinstitusionalisasi dalam organisasi massa yang selama ini memiliki basis riil seperti Nahdlatul Ulama di Propinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta, atau model menitipkan pada tokoh yang digaransi oleh organisasi berbasis islam (model Situbondo).

Satu hal lagi, pendekatan yang menarik untuk disimak adalah pendekatan hak ekonomi, sosial dan budaya *(ecosoc right)*. Pendekatan ini "telah memaksa pemerintah" untuk memberikan pelayanan yang layak, khususnya pada sektor-sektor yang selalu dibuat abu-abu dengan isu partisipasi masyarakat dan tanggung jawab bersama. *Succes Personal* dan *Succes Policy* (baik pada wiayah *civil society* maupun *government*) telah dipersitiwakan dalam progam yang berbasis pemenuhan hak ini di Kota Surakarta.

Kami menyadari bahwa fokus program PATTIRO lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas *civil society organization* (CSO termasuk masyarakat warga) dan kapasitas para pengambil kebijakan (pemerintah) dan penguatan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam pengelolaan sector public. Sedangkan wilayah kebijakan yang menjamin keterlibatan masyarakat belum cukup signifikan. Sejumlah keberhasilan kami dalam mengadvokasi kebijakan selama ini lebih banyak untuk isu sektor yang memang dibutuhkan masyarakat secara mendesak.

Secara pelan tapi pasti kerja kerja PATTIRO Surakarta didedikasikan untuk Mengembangkan Inovasi guna mewujudkan **Warga Proaktif dan Pemerintah Progresif.**

Salam,

Alif Basuki
Direktur Eksekutif

Women Report Card (WRC) yang Memberdayakan Perempuan Boyolali

Women Report Card (WRC), merupakan penilaian masyarakat (khususnya perempuan) terhadap pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Sebanyak 400 responden berusia di atas 17 tahun dan sudah menikah, dipilih dalam survey ini di Kabupaten Boyolali. Surveyornya pun sebagian besar perempuan yang tergabung dalam Jaringan Kerja Anggaran Responsif Gender Kabupaten Boyolali.

"Masya Allah….! Meski pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, namun tidak sampai di masyarakat" kata Lailutul Ni'mah, Pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Boyolali yang mengaku mendapatkan wilayah survey di Kecamatan Mojosongo dan Sawit.

Lain lagi dengan Lek Purwanto, pemuda Karanggede yang aktif di Jaringan Kerja Tani (Jakertani) Boyolali. Menurut Lek Pur yang mendapatkan wilayah survey di Kecamatan Karanggede dan Kecamatan Wonosegoro mengaku menemukan karakteristik responden yang cukup mencolok antara kelompok responden tamatan SLTA ke atas dengan responden yang hanya lulusan SLTP ke bawah. "Mereka yang hanya lulus SMP ke bawah seperti takut dalam memberikan jawaban, sedangkan mereka yang sempat mengenyam pendidikan sampai SLTA memberikan respon positif terhadap survey yang bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana anggaran daerah (pemerintah) mencukupi kebutuhan perempuan" tandas Lek Pur.

Kondisi Pelayanan Pendidikan

Dari 400 responden yang dilakukan secara acak di 19 kecamatan didapat gambaran bahwa responden terbanyak hanya lulusan SD (37,5%). Peringkat selanjutnya adalah responden lulusan SLTA sebanyak 23,8%. Untuk responden yang berhasil mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTP ada sebanyak 22,5%, dan perguruan tinggi sebanyak 10,0%; sisanya 6,3% menjawab pendidikan lainnya, bisa dari Diploma II, Keaksaraan Fungsional, dan lain-lain. Hal ini tidak mencengangkan bila gambaran umum hasil survey menunjukkan bahwa umumnya warga tidak memahami bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warganya, seperti layanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Warga lebih mudah mengenali kewajibannya dari pada harus mengidentifiki haknya.

Lebih jauh survey ini memotret bahwa sebanyak 58,8% yang mengaku anggota keluarganya sedang mengenyam pendidikan dasar masih mendapatkan sejumlah kesulitan, antara lain: 37,5% responden merasa akses menuju sekolah masih sulit; 63.2% responden masih dipungut biaya yang selayaknya tidak dipungut lagi, karena sudah ada bantuan dari pemerintah; 4% responden yang anggota keluarganya mengalami putus sekolah. Sedangkan untuk pendidikan menengah terdapat 19.1% responden pengguna layanan dengan rincian persoalan: 84.6% responden mengatakan akses menuju sekolah masih sulit, 64.1% responden mengatakan biaya yang ditetapkan sekolah masih memberatkan, 2.6% responden yang anggota keluarganya mengalami putus sekolah (50%-nya adalah perempuan).

Kondisi Pelayanan Kesehatan

Pada bidang kesehatan terdapat 83.9% responden yang pernah menggunakan jasa layanan kesehatan dasar di Puskesmas. Sebanyak 6,0% responden pengguna

layanan Puskesmas menyatakan kesulitan akses dengan beberapa kendala yaitu: jalan menuju puskesmas rusak (23,8%), tidak ada kendaraan umum atau tidak punya kendaraan pribadi untuk menuju puskesmas (33,3%), tempat Puskesmas terlalu jauh dengan tempat tinggal (42,9%). Disamping itu juga terdapat kebutuhan Puskesmas Keliling (63,2%) responden. Sedangkan untuk biaya berobat di Puskesmas yang pada aturannya gratis, masih ada 23,9% responden yang mengaku dikenai biaya saat berobat di Puskesmas.

Potret pelayanan khusus persalinan masih terdapat 70.6% responden telah menggunakan jasa bidan desa dan 16,6% responden yang menggunakan jasa peraji (dukun bayi). Sebanyak 7.3% responden yang mengatakan bahwa di daerahnya belum ada bidan desa. Kesulitan akses juga dirasakan oleh 8.0% responden dengan penyebab antara lain: tempatnya jauh dari tempat tinggal (83,3%), jalan menuju tempat persalinan rusak (8,3%) responden. Berkaitan dengan biaya yang dibebankan kepada responden dalam persalinan, 44,2% responden mengatakan biaya antara Rp. 100.000 – Rp. 300.000; 39,8% mengatakan biaya lebih dari Rp. 300.000., dan 16,0% responden mengatakan kurang dari Rp. 100.000.

Survey ini juga menggali usulan prioritas yang dibutuhkan perempuan yaitu: persalinan gratis bagi masyarakat miskin diusulkan oleh 56.4% responden, penyediaan obat-obatan dan vitamin Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bagi keluarga miskin diusulkan oleh 28,5% responden, kendaraan darurat yang dapat digunakan saat melahirkan, diusulkan oleh 11.0% responden, dan penambahan bidan desa, diusulkan oleh 4.1% responden.

Kondisi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Cakupan penggunaan KB di Kabupaten Boyolali menunjukkan 68.4%, telah dan masih menggunakan KB. Sedangkan suami yang telah menggunakan KB baru 10.8% atau 43 dari 400 responden. Dari total pengguna layanan KB 1,8% mengatakan susah untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat kontrasepsi cukup beragam: 62,0%

menyatakan harus mengeluarkan biaya Rp. 11.000 – Rp. 15.000,; sebanyak 20,9% harus mengeluarkan Rp. 5.000 – Rp. 10.000. dan sisanya, 17.1% harus mengeluarkan biaya diatas Rp. 15.000.

Respon permasalahan tersebut adalah 60.2% responden mengusulakan program KB gratis bagi masyarakat miskin; 21,2% mengusulkan penyediaan alat kontrasepsi di Posyandu; 14,9% mengusulkan penyuluhan KB bagi laki-laki & perempuan; dan 3,7% responden mengusulkan penyediaan tenaga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana).

Kondisi Akses Informasi Kesehatan

JOGLOSEMAR | KAMIS, 17 DESEMBER 2009

Dewan Bandel, Pattiro Lapor Gubernur

"Kami akan minta Gubernur menolak dan mengembalikan RAPBD ke Boyolali, seperti yang dilakukan Mendagri mengembalikan RAPBD Jatim ke Gubernur."

Atif Rasyid
Direktur Eksekutif Pattiro Surakarta

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap layanan dana bantuan sosial bidang kesehatan baru 30.7% responden yang mengetahui bantuan sosial tersebut. Informasi tersebut pun hanya sebatas tahu saja, tanpa mengetahui lebih dalam tentang prosedur penggunaan layanan. Sebanyak 32.0% mendapatkan informasi dari RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga); 27.9% diperoleh informasi dari Kantor Kepala Desa; dan hanya 14.8% responden yang mendapatkan informasi langsung dari Dinas Kesehatan; 9.0% mendapatkan informasi dari petugas puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu)/RSUD; 8.2% dari tetangga dan sisanya sebanyak 6.6% dari koran / radio.

Fakta-fakta itulah yang telah menggerakkan Jaringan Kerja Anggaran Responsif Gender Kabupaten Boyolali dengan pendampingan Pattiro Surakarta memperjuangkan anggaran responsif

gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 di Kabupaten Boyolali. Program dukungan yang berjudul Mendorong Pemerintah Lokal dalam Implementasi Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Boyolali merupakan kerjasama Pattiro Surakarta dengan Pattiro Jakarta yang didukung oleh The Asia Foundation. Program ini telah dilaksakan mulai tahun 2008 – semester 1 tahun 2010.

Walaupun secara nominal belum diketahui anggaran responsif gender pada APBD Kabupaten Boyolali tahun 2010 karena belum selesai tahapan pembahasan dan penetapan, namun Women Report Card ini telah menggugah kesadaran Pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti dan melaksanakan secara lebih serius lagi. Pak Eko, Kepala Bidang Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali misalnya, merasa bahwa survey ini seharusnya bukan hanya urusan Jaker ARG dan Pattiro, namun juga Pemerintah Kabupaten Boyolali karena Pemerintahlah yang akan menindaklanjuti hasilnya. "Sebaiknya survey ini jangan setengah-setengah, karena menjadi cermin evaluasi pelayanan yang dilaksanakaan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan akan kembali lagi kepada pemerintah" tandas Pak Eko.

Pada tingkat Desa, Rofiah (kader Posyandu di Kecamatan Cepogo) dan Juwariyah (Kader Posyandu dari Kecamatan Boyolali Kota) sudah mendesakkan anggaran responsif gender yang berbasiskan survey *Women Report Card* ini untuk dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Sekarang Menagih, Selama Ini Memohon

Adalah Agus Riyanto, Koordinator Pelaksana Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat untuk Transparansi Kebijakan (POKJA PUTK) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Tengah, sang pencetus kalimat pendek "Sekarang Menagih, Selama Ini Memohon". Kalimat pendek itu digunakanya menandai perubahan yang paling dirasakan kalangan *jam'iyyah* (organisasi) Nahdlatul Ulama di tingkat propinsi setelah hampir setahun membangun pembelajaran bersama Pattiro Surakarta dalam Program Civil Society Initiatives for Again Poverty yang didukung oleh The Asia Foundation.

"Selama ini kami memang menahan untuk berpartisipasi aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah, termasuk anggaran (APBD). Pertama, merasa bukan bidangnya; kedua, tidak memiliki keberanian dan keterampilan; dan ketiga jujur kami selalu mendapatkan alokasi untuk organisasi, kalau kami ber-*statmen* keras, khawatir berpengaruh negatif terhadap hubungan NU dengan pemerintah" tandasnya. Kami khawatir juga kalau organisasi tidak lagi mendapatkan jatah (alokasi) dalam APBD.

Orientasi ke dalam (organisasi) yang cenderung mementingkan kelompoknya dalam memandang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, sekarang telah bergeser kepada orientasi masyarakat luas. Bahwa ternyata kemiskinan warga khususnya warga *Nahdliyyin* lebih penting diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan mereka yang tidak beruntung.

Bukan hanya Agus, Ketua Tanfidz PW NU Jawa Tengah, K.H. Drs. Muhammad Adnan, MA dalam Halaqah (diskusi) bagi pengurus Nahdlatul Ulama di kawasan Solo Raya bertema Peningkatan Peran Ormas Islam dalam Penanggulangan Kemiskinan baru baru ini, memaparkan pentingnya perubahan paradigma berpikir kaum Nahdliyiin yang harus kontektual dalam penanggulangan kemiskinan dan banyaknya pemimpin yang tidak memihak kepada rakyat. Mohammad Adnan menandaskan bahwa para ulama Islam bukan hanya mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan akidah Islam, tapi juga punya tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan rakyat (Solopos, 20/01/2010).

Perubahan paradigma berfikir tersebut pun telah diikuti dengan aksi nyata pengkritisan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010, bahkan PW NU Jawa Tengah merupakan satu-satunya komponen masyarakat sipil yang lantang menyuarakan agar APBD berpihak kepada masyarakat miskin. Tak cukup melalui Pernyataan di media massa, PW NU melalui Lakpesdam (Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia) menfasilitasi sejumlah badan otonom dan lembaga yang bernaung dalam organisasi Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan ormas lain serta NGO di Semarang membentuk perangkat advokasi yang dinamakan KOLUABROR (Koalisi Umat untuk Advokasi Anggaran Berbasis Rakyat).

Analisis anggaran yang dilakukan Koalisi ini telah dikirim ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jawa Tengah sebelum penetapan anggaran. Koalisi ini menilai RAPBD belum layak ditetapkan karena tidak taat pada ketentuan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010 yakni Belanja Tidak Langsung lebih besar dibanding Belanja Langsung. Proporsi Rancangan APBD 2010 untuk Belanja Tidak Langsung (61,1%) lebih besar dibanding proporsi Belanja Langsung (38,9%). Demikian juga alokasi Belanja Modal pada Belanja Langsung Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 lebih kecil daripada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai/Personalia.

Analisis tren pada APBD yang dibuat juga mampu memvisualisasikan secara numerik menurunnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kesejahteraan masyarakat. Tren pertumbuhan alokasi Belanja Langsung yakni tahun 2007 ke 2008 sebesar 25,9%; tahun 2008 ke 2009 sebesar 14,9 %, sedangkan tren pertumbuhan alokasi Belanja Langsung tahun 2009 ke 2010 hanya mencapai 1,4%. Demikian juga prosentase alokasi belanja yang akan diserap masyarakat (Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) pada Rancangan APBD Tahun 2010 hanya mencapai 39,2%; menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2007 (39,3%), 2008 (45,5%), 2009 (43%).

RAPBD 2010
Belum Memihak
Rakyat Miskin

Bukan Cermin "Ball Deso mBangun Deso"

Perubahan cara berfikir, peningkatan keterampilan dan keahlian dalam advokasi anggaran pada jam'iyyah NU Propinsi Jawa Tengah memang sesungguhnya sudah dikendaki warga NU dalam Konferensi Wilayah pada tahun 2008. Untuk merealisaikan kebijakan organisasi tersebut Pattiro Surakarta bersama PW NU Jawa Tengah melaksanakan sejumlah strategi dan kegiatan seperti: Design Program Secara Partisipatif, sejumlah Focus Group Discussion (halaqah) tentang kemiskinan dan Kebijakan Publik, Pelatihan Membaca dan Menganalisis Anggaran, Pelatihan Advokasi Kebijakan, Workshop-workshop analisis kebijakan dan internal capacity building yang diikuti Badan Otonom dan Lembaga di lingkup PW NU Jawa Tengah seperti : Pengurus Syuriah dan Tanfidziyah, Fatayat, Muslimat, Lakpesdam, Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Lajnah Pendidikan Ma'afir, Lembaga Pertanian Nahdlatul

Ulama (LPNU), Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan juga anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah.

Kebijakan dan Anggaran pada tingkat Propinsi Jawa Tengah memang sangat jarang mendapatkan respon dari masyarakat langsung. Disamping masyarakat lebih banyak bersentuhan langsung dengan kebijakan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota, informasi penyusunan kebijakan ini juga jarang sampai kepada masyarakat apalagi ditambah tidak adanya saluran aspirasi yang cukup efektif untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan dan penganggaran tingkat propinsi.

Keterbatasan tersebut telah menginspirasi Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat untuk Transparansi Kebijakan (POKJA PUTK) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Tengah dan Lakpesdam Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, dalam halaqah "Mewujudkan Sensitivitas Ormas Islam dalam Pemberdayaan Publik pada 21-22 Desember 2009 untuk melahirkan "*komisi balkon*" DPRD Propinsi Jawa Tengah, dengan saluran aspirasi yang menyentuh masyarakat basis melalui simpul-simpul Lakpesdam di seluruh Kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah.

Empat Puluh Lima Juta untuk Jaminan Kepastian Usaha Pedagang Kaki Lima

Cerita sukses Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Monumen 45 di Banjarsari ke Pasar Notoharjo di Kecamtan Pasar Kliwon Kota Surakarta, telah mengharumkan nama Kota Surakarta. Bagaimana tidak! Pedagang Kaki Lima yang selama ini dianggap mengotori keindahan kota, sejak kepemimpinan Walikota Ir. Joko Widodo, PKL diposisikan sebagai aset bagi Kota Surakarta. Peristiwa boyongannyapun disulap menjadi seperti *event* kirab budaya pada 23 Juli 2006.

Dok. Pemkot Surakarta

Visi kebijakan ini bukan saja telah mengubah model pengelolaan dan penertiban PKL, namun juga memberikan jaminan kepastian usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Amanah tersebut tersurat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 3 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Perda itu sendiri mulai diundangkan pada 21 Juli 2008. Sisi positif dari Perda ini adalah adanya kepastian usaha bagi PKL yang telah memiliki Izin Penempatan, sehingga tidak khawatir lagi akan digusur oleh Satpol Pernertiban. Sisi negatifnya adalah Perda ini memberikan cek kosong kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk menyusun kembali kebijakan turunan bagi pengelolaan PKL.

Setidaknya ada 3 kebijakan turunan dalam bentuk Peraturan Walikota atau Keputasan Walikota tentang: (a) Penetapan tempat/kawasan yang diperuntukkan untuk PKL, (b) Tata Cara Pemberian Izin Penempatan kepada PKL, (c) Pembinaan dan Penertiban PKL.

Sudah satu tahun perda itu berlalu namun kebijakan turunan tersebut tidak pernah muncul, padahal bagi PKL Izin Penempatan tersebut merupakan jaminan usaha. Sejumlah narasumber pada Dinas Pengelola Pasar melalui bidang PKL Menyebutkan ketiadaan anggaranlah yang menghambat implementasi jaminan ini.

Forum Studi dan Silaturrahmi Nahdlatul Ulama Surakrata (FOSMINSA) melihat peluang ini sebagai media aktualisasi kiprah ormas islam dalam pemberdayaan kebijakan publik. "Kami tidak menolak kebijakan *zero growth* (pertumbuhan nol) bagi PKL di Kota Surakarta, namun PKL yang sudah ada selama ini perlu mendapatkan jaminan perlindungan usahanya". kata M. Ajie Najmuddin, Koordinator Pokja Ekonomi FOSMINSA.

Pembelajaran bersama Pattiro Surakarta melalui sejumlah pelatihan pembacaan dan analisis anggaran, serangkaian workshop analisi kebijakan yang melibatkan multi stakeholder penanggulangan kemiskinan, telah mengantarkan keberanian untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPRD Kota Surakarta. "Awalnya kami mendengar pos pemberdayan PKL telah kehilangan anggarannya karena rasionalisasi anggaran akibat menurunnya pendapatan pada RAPBD Kota surakarta tahun 2010. Namun kami meyakini bahwa jaminan kepastian usaha ini memang sangat dibutuhkan oleh PKL, dan ini merupakan kepedulian kami kepada masyarakat yang selama ini mendapatkan rizki dari profesi PKL. Alhamdulillah, setelah kami beraudiensi dengan DPRD, akhirnya ada alokasi anggaran untuk PKL untuk pendataan PKL sebagai jaminan usaha bagi pedagang" tambah Ajie.

Dok. Pemkot Surakarta

Jumlah empat puluh lima juta juga memang kecil, namun angka tersebut merupakan simbol bagi pengakuan jaminan kepastian usaha, karena salah satu

peruntukannya adalah untuk pengelolaan dan penerbitan Izin Penempatan Bagi PKL. Karena dalam Pemerintahan ini "Program sebagus apapun jika tidak disediakan pendanaan, maka hanya akan berhenti di kertas". Oleh karena itu kami harus memastikan nama program tersebut harus ada dalam APBD tahun 2010, walau nominalnya kecil, masih banyak sumber anggaran yang bukan hanya berasal dari APBD. Asal untuk kebaikan pasti banyak pihak yang membantu.

FOSMINSA diharapkan memiliki tingkat keberlanjutan program yang lebih abadi. Karena pengalaman selama ini baik pemerintah maupun NGO selalu mengakhiri kegiatannya ketika tidak ada lagi dana dari APBD maupun dari donor. "Kami berharap ini merupakan model institusionalisasi pemberdayaan dan transparansi kebijakan publik yang berbasiskan ormas islam" kata Krisnadi Janu, mahasiswa FISIP Universitas Sebelas Maret yang sedang menjalani program magang pada Pattiro Surakarta.

Walau sudah mulai berkiprah dalam memperjuangkan kebijakan public yang berpihak kepada masyarakat miskin sejak Oktober 2009, FOSMINSA baru di-*launching* pada 19 Januari 2009. Walikota Surakarta, Ir Joko Widodo dalam sambutan *Lauching* FOSMINSA ini sangat berharap adanya masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Karena itu, pihaknya sangat mengharapkan masukan dari masyarakat. "Masyarakatlah yang pandai. Sebenarnya Pemkot tidak tahu apa-apa. Apalagi walikotanya," kata Jokowi disambut tawa para hadirin (Solo Pos, 20/1/2010). Selain bidang Ekonomi FOSMINSA juga memiliki Kelompok Kerja Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

FOSMINSA yang memiliki visi "Mewujudkan Surakarta yang Sehat dan Cerdas" ini, dibentuk sebagai dinamika pembelajaran Program *Civil Society Initiatives for Against Poverty* yang mendapat dukungan dari The Asia Foundation pada tahun 2009.

Hak Ekosob untuk Warga Proaktif dan Pemerintah Progresif

"Harus ada pemerataan dalam pelayanan pendidikan, tidak memandang dari mana dia asalnya terutama pendidikan wajib belajar 9 tahun. Tugas Disdikpora itu seharusnya jangan hanya sebagai rutinitas seperti tahun lalu. Jangan bicara kualitas anak didik atau guru jika di daerah kita masih terdapat anak yang tidak bisa sekolah. Maka tugas Disdikpora harus turun ke kampung-kampung untuk mencari tahu siapa anak yang tidak bisa menuntaskan wajib sekolah. Memang biaya sekolah itu tidak sedikit, kalau hanya dinilai dari beasiswa, maka itu baru sebagian saja yang terselesaikan. Maka tugas Dinas jangan hanya rutinitas datang ke kantor tapi tidak menyelesaikan masalah" (Ir. H. Djoko Widodo, Wali Kota Surakarta, dalam seminar daerah)

Paragraf di atas patut direnungkan. Mengapa? Bukan saja karena disampaikan Walikota dalam forum resmi, yang itu artinya menjadi kebijakan, namun di tengah keterbatasan dan kultur kerja birokrasi yang selama ini dikenal kurang responsif, Walikota memastikan agar warganya dapat menerima pelayanan yang setinggi-tingginya. Walikota dalam perspektifnya telah mengintegrasikan paradigma hak ekosob dalam pelayanan publik; tidak cukup hanya responsif terhadap tuntutan masyarakat namun membangun progresifitas birokrasi untuk ke arah kemajuan, ke arah perbaikan dari keadaan sekarang, dan secara berjenjang naik derajat ke arah yang lebih baik.

"Menurut saya, ada perubahan cara pandang dari Pemerintah Surakarta (eksekutif dan legislatif) serta masyarakat khusunya kader Posyandu dalam memandang pelayanan publik. Dulu Posyandu itu hanya dilihat sebagai

keswadayaan masyarakat sehingga semuanya ditanggung oleh Posyandu, kalaupun ada dana dari pemerintah sifatnya hanya bantuan. Cara pandang itu sekarang telah berubah, kami memposisikan pelayanan kesehatan Balita, khususnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah sebagai kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan. Saya yakin cara pandang itulah yang telah berdampak pada peningkatan anggaran Posyandu Balita dari Rp 1.200.000 (tahun 2008) menjadi Rp. 1.800.000 pada APBD Perubahan tahun 2008, dan kemudian diteruskan pada tahun 2009 dan 2010. Kenaikan Rp 600.000 itu khususnya untuk Pemberian Makan Tambahan (PMT)" kata Ibu Rulliyani, ketua I Forum Komunikasi Kader Posyandu Kota Surakarta (FKKP).

Pendekatan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya (EKOSOB) dalam pelayanan publik merupakan terobosan dalam advokasi kebijakan. Beberapa waktu lalu pernah dikenalkan dengan *Citizen Charter* (kontrak pelayanan). Itu juga pendekatan dalam advokasi yang berbasiskan pada tawar menawar antara tuntutan masyarakat dengan kemampuan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan. "Dengan pendekatan hak ekosob ini, saya sebagai wartawan lebih mudah memetakan isu yang terjadi dimasyarakat dan arah penulisannya dalam rangka ikut mengadvokasi kebijakan yang berpihak kepada Masyarakat" tambah Ayu Prawitasari yang berprofesi sebagai wartawan di Harian Solopos.

Andwi Joko Mulyanto, *Community Organizer* Program Peningkatan Kapasitas Anggota Masyarakat, Pers, Legislatif, Eksekutif dan *Civil Society Organization* untuk Implementasi Pemenuhan Hak Ekosob yang didukung NZAID (New Zelan), mencatat ada perubahan yang cukup berarti setelah masyarakat, khususnya kader Posyandu mendapatkan pemahaman tentang hak ekosob dalam pelayanan publik. Dulu masyarakat ini cenderung *cuek*, jika terjadi pelayanan publik yang tidak

layak, namun sekarang mereka secara proaktif dapat melakukan penanganannya secara lebih baik.

Disamping itu, pendekatan ini juga telah melahirkan *success person* dan *success policy*. *Succes policy* seperti dikenalnya Ibu Rulliyani, dari kader yang biasa-biasa saja menjadi kader yang dikenal publik dalam kaitannya dengan advokasi pelayanan kesehatan. Bahkan Ibu Rulliyani ini juga telah dicatat Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan gagasan pembaharuannya dalam Musrenbang Kota Surakarta. Untuk Perumusan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2011, yang bersangkutan juga dilibatkan dalam Diskusi Kelompok Terbatas. Bukan hanya Bu Rulli ada sejumlah pengurus FKKP yang pendapatnya menjadi acuan bagi warga di sekitar tempat tinggalnya.

Di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta ada Ibu Reny Widyawati, SE (Fraksi Demokrat, anggota komisi IV) yang cukup *leading* dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. "Reny cukup fasih memberikan narasi kepada mitra kerja dan media massa dalam memperjuangkan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang berbasis hak. Peran yang dimainkan Reny cukup berarti bagi perkembangnan PKMS. Dalam Pengawasan yang dilakukannya menemukan kendala-kendala pelaksanaan program PKMS di lapangan, antara lain disebabkan oleh proses administrasi dalam pembuatan kartu PKMS dan tidak memungkinkannya Dinas Kesehatan bekerja sama dengan seluruh Rumah Sakit Swasta sebelum memiliki MoU" tambah Joko.

Produk Kebijakan Yang berhasil diadvokasi tahun 2009

1. Kenaikan Anggaran Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, dari Rp 11 Milyar (2009) menjadi Rp 16 Milyar (2010) pada APBD Kota Surakarta Tahun 2010;
2. Kenaikan anggaran bidang pendidikan (pendamping BOS);
3. Aggaran untuk Program Jaminan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta sebesar Rp 45 juta pada APBD Kota Surakarta Tahun 2010.

Sinergi Kerja PATTIRO Surakarta Dalam Kemitraan

No.	Nama Organisasi	Tema/Program
A. Basis		
1.	Jaringan Kerja Petani Boyolali	Anggaran Responsif Gender dan Anggaran Tani
2.	Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB)	Pendampingan/Asistensi Permasalahan yang dihadapi Pengemudi Becak di Surakarta baik menyangkut manajemen komunitas maupun kebojakan public.
3.	Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP)	Pedampingan terhadap posyandu dalam menuntut pemenuhan hak kesehatan bagi anak-anak balita kepada Pemerintah Kota Surakarta.
4.	Forum Studi dan Silaturrahmi Warga Nahdatul Ulama Surakarta (FOSMINSA)	Pedampingan Ormas Islam dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan /penganggaran pembangunan, kebijakan public dan pengembangan masyarakat
5.	Paguyuban Pedagang Kakilima Transito	Pendampingan Pedagang Kaki Lima dalam mengakses program-program pemberdayaan Pedangan Kaki Lima di Pemerintah Kota Surakarta
B. Ormas		
1.	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Tengah	Peningkatan peran ormas islam dalam tranpparansi kebijakan dan anggaran public Asistensi Teknis Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat untuk Transparansi Kebijakan (POKJA PUTK)
2.	Nahdlatul Ulama Kota Surakarta	Asistensi teknis keterlibatan NU dalam Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota
3.	Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan	Penyediaan Resources Person untuk pembelajaran bertema Kebijakan Publik

4.	Muslimat Nahdlatul Ulama Surakarta dan Fatayat NU Surakarta	Asistensi teknis keterlibatan perempuan dalam Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota
C. Akademisi		
1.	FISIP dan Lab. UCYD FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta	a. Pengkajian permasalahan Kota Surakarta dan isu kemiskinan b. Magang mahasiswa S-1 c. Kerjasama penelitian sosial
2.	FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pengkajian permasalahan Pendidikan di Kota Surakarta
3.	LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta	Pengkajian isu-isu gender, lingkungan di Kota Surakarta dan isu kemiskinan
4.	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	a. Pengkajian permasalahan hukum di Kota Surakarta b. Advokasi kasus korupsi di Surakarta
4.	a. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta b. Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pengkajian isu-isu kesehatan di Kota Surakarta

D. Koalisai Non Government Organization (NGO)		
1.	Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS)	a. Pengkajian maslah-masalah pendidikan b. Advokasi Perda Pendidikan
2.	Konsorsium Solo	a. Pengkajian dan Advokasi Program Penanggulangan Kemiskinan b. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan
3.	Cicak Surakarta	Advokasi antikorupsi di Surakarta
E. Pemerintah Kota Surakarta		
1.	Dinas Kesehatan	a. Asistensi teknis penyusunan SPM Kesehatan b. Asistensi teknis kebijakan POSYANDU dan PMT c. Advokasi PKMS
2.	Dinas Pendidikan	a. Asistensi teknis penyusunan unit cost b. Avokasi Beasiswa Pelayanan Pendidikan
3.	Dinas Pengelola Pasar	a. Advokasi Jaminan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) b. Pemberdayaan PKL c. Pengkajian masalah-masalah PKL
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Partisipatif
5.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Advokasi anggaran daerah
6.	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberdayaan ekonomi PKL dan Pengemudi Becak
7.	Dinas Tenaga Kerja	Advokasi Program Penanggulangan Kemiskinan

8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Advokasi Program Penanggulangan Kemiskinan
9.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluaraga Berencana	Advokasi Program Penanggulangan Kemiskinan
10.	Dinas Perhubungan	Advokasi kebijakan pengelolaan lalu lintas dan pengemudi becak
E. Pemerintah Kabupaten Boyolali		
1.	Dinas Pendidikan	Anggaran Responsif Gender
2.	Dinas Kesehatan	Anggaran Responsif Gender
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggaran Responsif Gender
4.	Dinas Perhubungan	Anggaran Responsif Gender
5.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Anggaran Responsif Gender
6.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggaran Responsif Gender

F. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta		
1.	Pimpinan Dewan	Legislasi Perda, APBD dan monitoring pelaksanaan APBD
2.	Komisi I	Legislasi Kebijakan Daerah dan reformasi tata pemerintahan
3.	Komisi III	Advokasi Peningkatan dan pengawasan Pendapatan Daerah
4.	Komisi IV	Advokasi Program Pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan
G. Organisasi Profesi		
1.	Ikatan Dokter Indonesia Kota Surakarta	Pengkajian isu-isu kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat
2.	Ikatan Bidan Indonesia Kota Surakarta	Pengkajian isu-isu kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat
3.	Kantor Akuntan Publik Rahmad Wahyudi,	Pengkajian isu-isu keuangan daerah, dan transparansi penganggaran

Publikasi Terbitan PATTIRO

1. Buku Pelembagaan dan Monev Partisipatif
2. Buku Memusiumkan Kemiskinan (studi Kasus di Kota Surakarta)
3. Buku Monitoring MUSRENBANG Kelurahan di Kota Surakarta
4. Poster Sosialisasi Anggaran dan Kalender Kesehatan Kota Surakarta
5. Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
6. Poster Transparansi Agggaran Publik Pemerintah Kota Surakarta
7. Buletin Gapura, kerjsama dengan Lakpesdam PW NU Jawa Tengah Buletin
8. Kota Kita